

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)**



**KECAMATAN SOOKO  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan Rencana Pembangunan dan Perencanaan Jangka Pendek 1 (satu) tahun kedepan Kecamatan Sooko

Dalam Renja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (tahun 2023) serta kebijakan, program, kegiatan, sasaran yang disesuaikan dengan Tupoksi Kecamatan Sooko yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko. Selain itu Renja sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA – PD) dan merupakan dokumen yang menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya sumber daya yang efisien, efektif dan berkelanjutan, juga digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 ).

Semoga dengan tersusunnya Renja Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan perencanaan program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Sooko 1 (satu) tahun kedepan.

Sooko, 15 Maret 2023



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
KEPUTUSAN.....	3
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Ladasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II   HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
TC. 29	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
TC. 30.....	23
2.3 Isu –Isu tentang Penyelenggraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
TC.31	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
TC 32	
BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	52
3.3 Program dan Kegiatan .....	52
TC 33	
BAB IV   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	60
BAB V    PENUTUP.....	66



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN SOOKO**

**Jl. Sooko – Pulung Nomor : 02 Telp. (0352) 571356**

Fax (0352) 571356, Kode Pos 63482

Website : <https://sooko.ponorogo.go.id>, Email : [sookokecamatan@gmail.com](mailto:sookokecamatan@gmail.com)

**SOOKO**

KEPUTUSAN CAMAT SOOKO KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ /405.30.06/2023

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SOOKO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ;
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 TAHUN 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2016;
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 ).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Camat Sooko Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Sooko Tahun 2024

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD )

Tahun 2023 adalah Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

#### **Pasal 2**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2024 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 ( Satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### **Pasal 3**

(1). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)

Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

( Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan )

**BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU**

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

## BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman SKPD Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2024

### Pasal 5

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sooko

Pada Tanggal : Maret 2023





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini, yang merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah untuk tahun 2024 tidak mengalami perubahan.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2024 berpedoman kepada Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021;
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator kinerja Utama;

19. Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1947/405.29/2019 tentang Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo ;

20. Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sooko Tahun 2024 adalah

- Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sooko Tahun 2024
- Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program / kegiatan Kecamatan Sooko pada Tahun 2024.

b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kecamatan Sooko tahun 2024 adalah :

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan di Kecamatan Sooko Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2024.
- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Sooko dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Sooko tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Reviu Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi / Kabupaten / kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

## BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SOOKO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sooko Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sooko, Kabupaten Ponorogo

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III :TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengantugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sooko dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sooko tahun 2024 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahserta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

**1. Tugas :**

Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Sooko tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sooko dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

**Tabel TC-29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023**  
**KABUPATEN PONOROGO**

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SOOKO

				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 ( n - 2 )	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 ( n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1 (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ( n - 2 )	Tingkat Realisasi (%)			
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100 %					100 %	100 %	
					Prosentase dokumen perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	100%					100%	100%	
					Prosentase Sarana Dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100%					100%	100%	
				PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %					100 %	100 %	
				Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	8 dokumen					8 dokumen	8 dokumen	
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	6 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	

				Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD yang tersusun							
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %					100 %	100 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	17 orang					17 orang	17 orang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	5 orang					5 orang	5 orang
				Penyusunan Laporan Akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentasi keakuratan data kepegawaian	100 %					100 %	100 %
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas	17 orang					17 orang	17 orang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penerima Pegawai	1 orang					1 Orang	1 Orang
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %					100 %	100 %
				Penyedia Komponen Instalasi Listyrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	4 paket					4 paket	4 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai	17 orang					17orang	17 orang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 Paket					4 Paket	4 Paket

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Unit					1 Unit	1 Unit	
			Penyediaan peralatan rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga yang di beli	4 Unit					4 Unit	4 Unit	
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	4 Rakor					4 Rakor	4 Rakor	
			KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %					100 %	100 %	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1.200 Surat					1.200 surat	1.200 surat	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	12 bulan					12 bulan	12 bulan	
			KEG : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %					100 %	100 %	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	6 unit					6 unit	6 unit	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang terpelihara	4 Unit					4 unit	4 Unit	
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Paket					1 Paket	1 Paket	
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan								
			KEG ; KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%					100%	100%	

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelompok seni budaya ( Grebeg Suro )	4 event					4 Event	4 even	
				Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 event					4 event	4 event	
				Jumlah Pokja Sehat	6 Pokja/desa					6 Pokja/Desa	6 Pokja/Desa	
			KEG : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	100%					100%	100%	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat Jumlah Standar Pelayanan Publik yang terbitkan	1 SPP					1 SPP	1 SPP	
				Jumlah Standar Pelayanan Publik yang terbitkan	38 SOP					38 SOP	38 SOP	
				Jumlah Surat Rekomendasi	150 Surat					150 surat	150 Surat	
			KEG : KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100 %					100 %	100 %	
			Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	1 Penerima					1 Penerima	1 Penerima	
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Indek Desa Membangun	6 desa					6 desa	6 desa	
			KEG : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah desa yang mengikuti BBGRM dan Lomba Desa di tingkat Kabupaten	6 desa					6 desa	6 desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Bulan Bakti	6 desa					6 desa	6 desa	

				Kecamatan	Gotong Royong Masyarakat							
					Jumlah desa yang mengikuti lomba Desa tingkat kecamatan	6 desa					6 Desa	6 Desa
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan	100%					100%	100%
				KEG : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	6 desa					6 desa	6 desa
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	2 Even					2 Even	2 Even
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	6 desa					6 desa	6 desa
					Jumlah Laporan Pemerintahan Jasa pembinaan Anggota Forpimka	4 Laporan					4 Laporan	4 laporan
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	100%					100%	100%
				KEG : FASILITASI, REKOMENDASI, DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	100 %					100 %	100 %

					Jumlah Desa yang di bina Pengelolaan Keuangan dan asset desa	6 Desa					6 Desa	6 Desa		
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	40 produk hukum					40 produk hukum	40 produk hukum	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	6 desa					6 desa	6 desa	
					Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangan Undangan	Jumlah Penerima jasa klinik Hukum	1 Penerima					1 Penerima	1 Penerima	
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan ketentraman dan ketertiban Umum	6 Desa					6 Desa	6 Desa	
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	6 desa					6 desa	6 desa	
					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok PKK aktif	6 kelompok					6 kelompok	6 kelompok	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sooko berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sooko dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  - Jumlah Surat / rekomendasi yang diterbitkan terhadap yang diajukan
- Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Sooko memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### **1.1 Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sooko
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;

12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Sooko tiap 1 Minggu sekali;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sooko;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

## **1.2 Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sooko ;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **1.3 Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

**Tabel TC 30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOOKO**  
**KABUPATEN PONOROGO**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			86	86	86	86	91,49	92.19	86	86	
3	Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3 Isu –Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Sooko sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Sooko masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) keterbatasan SDM yang berkualitas

Visi Kabupaten Ponorogo adalah

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT “.**

( Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa) Untuk mendukung visi tersebut, perlu disusun misi sebagai upaya tahap berikutnya.

Adapun Misi Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berbasis Pertanian dan Pariwisata ;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya ;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan ;
4. Menujudkan Tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sooko, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Ponorogo kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Ponorogo;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, Adil, ramah dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

TABEL T-C. 31  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024  
KABUPATEN PONOROGO

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SOOKO

Lembar ..... dari .....

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kecamatan Sooko	Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi	100%	1.885.128.726	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Sooko	Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi	100%	1.885.128.726	
Prosentase dokumen perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu			Prosentase dokumen perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu								
Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi			Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi								
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	2.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	2.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	12 dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sooko	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	12 dokumen	1.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sooko	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	10 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sooko	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	10 dokumen	1.000.000	
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Sooko			1.652.102.770	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Sooko			1.652.102.770	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	17 orang	1.628.602.770	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sooko	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	1.628.602.770	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sooko	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	7 orang	22.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sooko	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	7 orang	22.500.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Sooko	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	1.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Sooko	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	1.000.000	
	<b>Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Sooko			15.800.000	<b>Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. Sooko			15.800.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Sooko	Jumlah penerima pakaian dinas	17 orang	10.300.000	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Sooko	Jumlah penerima pakaian dinas	17 orang	10.300.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sooko	Jumlah Penerima Pegawai	1 Orang	5.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sooko	Jumlah Penerima Pegawai	1 Orang	5.500.000	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec . Sooko			<b>153.018.414</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec . Sooko			<b>149.862.911</b>	
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec . Sooko	Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	3.000.000	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec . Sooko	Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec . Sooko	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai	17 orang	78.388.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec . Sooko	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian pegawai	17 orang	78.388.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec . Sooko	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	2,370.511	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec . Sooko	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	2,370.511	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec . Sooko	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 unit	27.692.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec . Sooko	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 unit	27.692.600	
	Penyediaan peralatan rumah Tangga	Kec . Sooko	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	1 Paket	18.652.300	Penyediaan peralatan rumah Tangga	Kec . Sooko	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan	1 Paket	18.652.300	
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec . Sooko	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	5 rakor	20.000.000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec . Sooko	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	5 rakor	20.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec . Sooko	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	12.000.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec . Sooko	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	12.000.000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec . Sooko	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1.700 surat	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec . Sooko	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1.700 surat	3.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec . Sooko	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	12 Lap./bulan	9.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec . Sooko	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	12Lap/bulan	9.000.000	
	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>	Kec . Sooko			487.073.397.11	<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>	Kec . Sooko			487.073.397.11	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec . Sooko	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	6 unit	57,980.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec . Sooko	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	6 unit	57.980.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec . Sooko	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diperbaiki	4 unit	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec . Sooko	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diperbaiki	4 unit	4.000.000	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec . Sooko	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Paket	425,093.397,11	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec . Sooko	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 Paket	425.093.397.11	
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec . Sooko	IKM Kecamatan		118.188.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec . Sooko	IKM Kecamatan		118.188.000	

	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec . Sooko	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	95.688.000	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kec . Sooko	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%	95.688.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sooko	Jumlah event Seni budaya dan Grebeg Suro	4 event	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sooko	Jumlah event Seni budaya dan Grebeg Suro	4 event	40.000.000	
		Kec. Sooko	Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 event	46.688,000		Kec. Sooko	Jumlah Event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 event	46.688.000	
		Kec. Sooko	Jumlah Pokja Sehat	6 pokja	9.000.000		Kec, Sooko	Jumlah Pokja Sehat	6 pokja	9.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Sooko	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	100 %	4.500.000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Sooko	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	100 %	4.500.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sooko	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat Jumlah Standar Pelayanan Publik yang terbitkan	1 SPP	1.500.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sooko	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat Jumlah Standar Pelayanan Publik yang terbitkan	1 SPP	1.500.000	

			Jumlah Standar Pelayanan Publik yang terbitkan	38 SOP	1.500.000			Jumlah Standar Pelayanan Publik yang terbitkan	38 SOP	1.500.000	
			Jumlah Surat Rekomendasi	150 surat	1.500.000			Jumlah Surat Rekomendasi	150 surat	1.500.000	
	<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Kec. Sooko	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	18.000.000	<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Kec. Sooko	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	18.000.000	
	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kec. Sooko	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	1 orang	18.000.000	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Kec. Sooko	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	1 orang	18.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec Sooko	Prosentase Desa yang Meningkatkan Index Ketahan Ekonomi ( IKE )		2.000.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Sooko	Prosentase Desa yang Meningkatkan Index Ketahan Ekonomi ( IKE )		2.000.000	
	<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	Kec Sooko	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	1 desa	2.000.000	<b>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	Kec Sooko	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM tingkat kabupaten	1 desa	2.000.000	
	<b>Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>	Kec Sooko	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan	6 desa	2.000.000	<b>Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>	Kec Sooko	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan	6 desa	2.000.000	

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec Sooko		100%	46.940.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kec Sooko		100%	46.940000	
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	Kec Sooko	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	46.940.000	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	Kec Sooko	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	46.940.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Sooko	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	6 kegiatan	30.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Sookk	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	6 kegiatan	30.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	6 desa	16.940.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	6 desa	16.940.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Sooko	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	100%	46.600.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Sooko	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	100%	46.600.000	
	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi</b>	Kec.Sooko	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan	100%	46,600,000	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi</b>	Kec. Sooko	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan	100%	46,600,000	

	<b>pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti			<b>pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Sooko	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	40 Produk Hukum	3.000.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Sooko	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	40 Produk Hukum	3.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sooko	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	6 desa	4.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Sooko	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	6 desa	4.000.000	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangan Undangan	Kec. Sooko	Jumlah Penerima Klinik Hukum	1.Penerima	14.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundangan Undangan	Kec. Sooko	Jumlah Penerima Klinik Hukum	1.Penerima	14.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sooko	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	6 desa	3.000.000	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kec. Sooko	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	6 desa	3.000.000	
			Jumlah Desa dimonitoring Pembinaan Kewilayahan	6 Desa	3.000.000			Jumlah Desa dimonitoring Pembinaan Kewilayahan		3.000.000	
			Jumlah PBB – P2 yang harus disetor					Jumlah PBB – P2 yang harus disetor			
			Jumlah SPPT dan STTP PBB – P2 yang didistribusikan					Jumlah SPPT dan STTP PBB – P2 yang didistribusikan			
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kec. Sooko	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	6 Desa	7.600.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kec. Sooko	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	6 Desa	7.600.000	

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Sooko	Jumlah kelompok PKK aktif	6 kelompok	12.000.000	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Sooko	Jumlah kelompok PKK aktif	6 kelompok	12.000.000	
--	------------	------------------------------	---------------	------------	---	---------------	------------------------------	------------	------------	--

## 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMENGGU KEPENTINGAN TAHUN 2024

REKA PDAFTAR KEGIATAN PRIORITAS DESA/KELURAHAN MENURUT PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN : SOOKO  
TAHUN : 2024

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT						VOLUME	PAGU USULAN (Rp)	NO SURAT/PROPOSAL	TGL SURAT PROPOSAL	OPD Penanggung Jawab
			NAMA JALAN	RT	RW	DUSUN	DESA	NOMOR RUAS (INFRASTRUKTUR)					
1	2	3	4						5	6	7	8	9
A	BEDOHO												
1	Gedung Balai Desa	Hibah - Infrastruktur Bangunan Gedung	Desa Bedoho	001	002	SEPUNG	BEDOHO		540 M <sup>2</sup>	Rp 200.000.000	140/16/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Rabat Jalan Puru - Kalitengah	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Puru - Kalitengah	001	002	PURU	BEDOHO		1.000 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Rabat Jalan Banaran	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Banaran	001	004	SEPUNG	BEDOHO	1619	400 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Rabat Jalan Pakjati	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Pakjati	002	003	JETIS	BEDOHO		300 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Rabat Jalan Dawung	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Dawung	001	001	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Rabat Jalan Pakduwet - Nongkosalak	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Pakduwet - Nongkosalak	003	002	JETIS	BEDOHO	1430	700 M	Rp 400.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Rabat Jalan Dawung - Thileng	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Dawung - Thileng	003	001	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 400.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

													Permukiman
8	Rabat Jalan Banjarjo	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Banjarjo	003	004	SEPUNG	BEDOHO		600 M	Rp 400.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Rabat Jalan Tenganan - Dandan	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Tenganan - Dandan	002	001	JETIS	BEDOHO		500 M	Rp 40.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Rabat Jalan Grageh	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Grageh	001	003	SEPUNG	BEDOHO		250 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Rabat Jalan Dawung Tengah	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Dawung Tengah	002	001	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Rabat Jalan Dawung Tengah	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Dawung Tengah	002	001	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Rabat Jalan Pelemgadung	Belanja Program - Pembangunan Jalan	Jalan Pelemgadung	001	003	JETIS	BEDOHO		400 M	Rp 200.000.000	140/17/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
13	Rabat Jalan Usaha Tani Sawah karang	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan Sawah Karang	003	003	SEPUNG	BEDOHO		250 M	Rp 200.000.000	140/18/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
14	Rabat Jalan Usaha Tani Sawah Beji	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Jalan Sawah Beji	002	004	JETIS	BEDOHO		200 M	Rp 200.000.000	140/18/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
15	Irigasi Dam Unyer	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Dam Unyer	001	004	SEPUNG	BEDOHO		285 M	Rp 300.000.000	140/19/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
16	Irigasi Dung Gong	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Dung Gong	002	001	JETIS	BEDOHO		600 M	Rp 300.000.000	140/19/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Irigasi Dam Ringin	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Dam Ringin	001	002	JETIS	BEDOHO		300 M	Rp 300.000.000	140/19/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
18	Irigasi Sekebo	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi Sekebo	001	003	SEPUNG	BEDOHO		700 M	Rp 300.000.000	140/19/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
19	Dam Dung Gong	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi	Dam Dung Gong	001	004	JETIS	BEDOHO		20 M	Rp 300.000.000	140/20/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan

		Dam Parit											dan Perikanan
20	Dam Unyer	Belanja Program - Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit	Dam Unyer	001	004	SEPUNG	BEDOHO		20 M	Rp 300.000.000	140/20/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
21	Penyediaan Benih Unggul	Belanja Program - Pengembangan Kampung Hortikultura (Bantuan Bibit Buah-buahan/Sayuran)	Desa Bedoho				BEDOHO		1 Paket	Rp 100.000.000	140/21/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
22	Penyediaan Saprodi	Belanja Program - Pengadaan Sarana Prasarana Pra Panen (Handtraktor)	Desa Bedoho				BEDOHO		1 Paket	Rp 100.000.000	140/21/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
23	Wisata Religi Makam Puthuk Ungkal	Hibah-Pengembangan Desa Wisata	Makam Puthuk Ungkal	003	003	SEPUNG	BEDOHO		5000 M <sup>2</sup>	Rp 200.000.000	140/22/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
24	Wisata Religi Makam Mlathen	Hibah-Pengembangan Desa Wisata	Makam Mlathen	003	003	SEPUNG	BEDOHO		300 M <sup>2</sup>	Rp 200.000.000	140/22/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
25	Pembangunan Gedung TK/PAUD	Hibah - Pembangunan Sekolah Swasta Tingkat Paud	TK/Paud	003	003	SEPUNG	BEDOHO		250 M <sup>3</sup>	Rp 200.000.000	140/23/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pendidikan
26	Talud SDN 2 Bedoho	Belanja Program - Sarana Prasarana Pendidikan Negeri	SDN 2 Bedoho	003	003	SEPUNG	BEDOHO		100 M	Rp 100.000.000	140/23/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pendidikan
27	Pagar SDN 3 Bedoho	Belanja Program - Sarana Prasarana Pendidikan Negeri	SDN 3 Bedoho	001	002	PURU	BEDOHO		40 M	Rp 100.000.000	140/23/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pendidikan
28	Drainase Jalan Puru ke Kalitengah	Belanja Program - Pembangunan Drainase Lingkungan	Jalan Poros Puru Kalitengah- Desa Suren	001	002	PURU	BEDOHO		1.000 M	Rp 200.000.000	140/24/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Drainase Jalan Banaran	Belanja Program - Pembangunan Drainase Lingkungan	Jalan Banaran	001	004	SEPUNG	BEDOHO	1619	400 M	Rp 200.000.000	140/24/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Drainase Jalan Dawung	Belanja Program - Pembangunan Drainase Lingkungan	Jalan Dawung	003	001	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/24/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Drainase Jalan Banjarjo	Belanja Program - Pembangunan Drainase Lingkungan	Jalan Banjarjo	002	004	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/24/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Drainase Jalan	Belanja Program -	Jalan Tenganan	002	001	JETIS	BEDOHO	1429	500 M	Rp	140/24/405.30.06.2005/2023	18 Januari	Dinas Pekerjaan

	Tengaran	Pembangunan Drainase Lingkungan							200.000.000		2023	Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
33	Drainase Pakjati	Belanja Program - Pembangunan Drainase Lingkungan	Jalan Pakjati	002	003	JETIS	BEDOHO		250 M	Rp 200.000.000	140/24/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	Talud Tengaran	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Tengaran	002	001	JETIS	BEDOHO	1429	300 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	Talud Jalan Puru ke Kalitengah	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Poros Puru Kalitengah- Desa Suren	001	002	PURU	BEDOHO		1.000 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
36	Talud Jalan Banaran	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Banaran	001	004	SEPUNG	BEDOHO	1619	400 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
37	Talud Dawung-Thileng	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Dawung - Thileng	003	001	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Talud Jalan Banjarjo	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Banjarjo	003	004	SEPUNG	BEDOHO		600 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	Talud Dawung Tengah	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Dawung Tengah	003	001	SEPUNG	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	Talud Thileng	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Thileng	001	001	PURU	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	Talud Pelemgadung	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Pelemgadung	001	003	JETIS	BEDOHO		400 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	Talud Kancil - Pakjati	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Kancil - Pakjati	001	004	JETIS	BEDOHO		500 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum,

													Perumahan dan Kawasan Permukiman
43	Talud Jetis	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Poros Bedoho - Klepu	002	004	JETIS	BEDOHO	1429	250 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
44	Talud Dandan	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Dandan	003	001	JETIS	BEDOHO		100 M	Rp 100.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Talud Grageh	Belanja Program - Pembangunan Talud	Jalan Grageh	001	003	SEPUNG	BEDOHO		250 M	Rp 200.000.000	140/25/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
46	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	Belanja Program - Penanganan Persampahan	Desa Bedoho				BEDOHO		400 M <sup>2</sup>	Rp 100.000.000	140/26/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Lingkungan Hidup
47	Pondok Bersalin Desa	Hibah - Infrastruktur Kesehatan	Desa Bedoho				BEDOHO		60 M <sup>2</sup>	Rp 200.000.000	140/27/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Kesehatan
48	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Belanja Program - Pembangunan SPAM Perdesaan	Desa Bedoho				BEDOHO		1 paket	Rp 400.000.000	140/28/405.30.06.2005/2023	18 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>B</b>	<b>JURUG</b>												
1	Peningkatan Jalan Jurusan Jurug Bedrug	Rusak parah	Jalan PU di Srayu	2	3	Srayu	Jurug		500 M	500.000.000	620/7/405.30.06.2006/2023	25-Jan-23	Dinas PU
2	Peningkatan Jalan Jurusan Jurug Bedrug	Rusak parah	Jalan PU di Nlegok	1	2	Nlegok	Jurug		450 M	450.000.000			Dinas PU
3	Peningkatan Jalan Jurusan Jurug Bendungan Kab. Trenggalek	Rusak Parah	Jalan Poros Desa di Lingkungan Gobar Watuglungung	-	03, 04, 05	Plongko	Jurug		1.600 M	900.000.000	620/7/405.30.06.2006/2023	25-Jan-23	Dinas PU
4	Rehab Talud Plengsengan Badan Jalan Jurusan Puduk Sooko	Rusak akibat bencana	Jalan PU di dukuh Setumbal	2	1	Setumbal	Jurug		85 x 5 M	450.000.000	620/7/405.30.06.2006/2023	25-Jan-23	Dinas PU
5	Peningkatan Jalan Depan kantor Desa	Jalan Rusak	Jalan Desa di Dukuh Jurug	-	02, 03	Jurug	Jurug		800 M	650.000.000			Dinas PU
6	Peningkatan Jalan Wisata	Rusak	Jalan Desa di Dukuh Kranggan	3	2	Kranggan	Jurug		800 M	650.000.000			Dinas PU

	Pletuk												
7	Rehab Jembatan Sungai Jurug	Kurang memadai	Jalan Poros Desa	1	2	Jurug	Jurug		I Unit	450.000.000			Dinas PU
8	Rehab Jembatan Sungai Nglegok	Kurang memadai	Jalan PU	1	2	Nglegok	Jurug		I Unit	450.000.000			Dinas PU
9	Rehab Jembatan Sungai Kepon	Rusak Kurang Memadai	Jalan Poros Desa	1	3	Plongko	Jurug		I Unit	450.000.000			Dinas PU
10	Rehab DAM dan Saluran Irigasi Glutuk I	Rusak Terkena Bencana		1	2	Kranggan	Jurug		I Unit	350.000.000			Dinas pengairan
11	Rehab DAM dan Saluran Irigasi Glutuk II	Rusak Terkena Bencana		3	1	Kranggan	Jurug		I Unit	350.000.000			Dinas pengairan
12	Rehab DAM dan Saluran Irigasi Gungan	Rusak Terkena Bencana		2	3	Jurug	Jurug		I Unit	350.000.000			Dinas pengairan
13	Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jurusan Jurug Bareng Kec. Puduk lewat Jemono	Belum Memadai	Jalan Poros Desa	2	3	Kranggan	Jurug		750 M	250.000.000			Dinas PU
14	Tempat Pembuangan Sampah	Belum ada		2	2	Srayu	Jurug		I Unit	150.000.000			Lingkungan Hidup
15	Rehab Balai Dukuh Srayu	Rusak Terkena Bencana		2	2	Srayu	Jurug		1 unit	250.000.000			
16	Rehab Balai Dukuh Plongko	Rusak		2	2	Plongko	Jurug		1 unit	100.000.000			
17	Pembangunan Ruang Klas SDN 3 Jurug	Kurang Ruangan		2	1	Nglegok	Jurug		2 Lokal	400.000.000			Dinas Pendidikan
18	Pembangunan Talud Plengsenagan Pengaman Aset Kelompok Tani Dan Warga Plongko	Tergerus Aliran Sungai		2	2	Plongko	Jurug		60 x 4 M	300.000.000			
<b>C</b>	<b>DESA SOOKO</b>												
1	pembangunan talud	pembangunan talud	jalan raya Kabupaten	3	1	dalangan	sooko	34.2	8 x 100 = 800 m3	Rp300.000.000,00		18-Jan-23	PUPKP
2	rehabilitasi jalan	Jalan rusak berat	Jalan sooko - blimbing	2	2	Sooko	Sooko	1432	200 x 3 = 600 m3	Rp400.000.000,00		18-Jan-23	PUPKP
3	HIBAH - pengembangan desa wisata	potensi wisata yang harus dibangun	lingkungan Guwo Sooko	2	4	Sooko	Sooko	1432	1 ls	Rp200.000.000,00		18-Jan-23	DISBUDPARPORA
4	BKKDD - infrastruktur	Pasar mulai rusak perlu segera di perbaiki		1	1	sombro	sooko		1 ls	Rp400.000.000,00		18-Jan-23	BPPKAD

	pasar desa												
5	BKKDD- pembangunan infrastruktur pelayanan publik	Kantor desa dimakan usia		1	1	Sombro	sooko		1 ls	Rp300.000.000,00		18-Jan-23	BPPKAD
6	BELANJA PROGRAM - Pembangunan TPA/TPST/TPS	sampah yang tidak dikelola		1	1	sombro	sooko		1 ls ( 10 m x 10 m )	Rp300.000.000,00		18-Jan-23	PUPKP
7	HIBAH - Sarana Prasarana Karang taruna	butuh tempat sanggar bermain anak		1	1	Sooko	Sooko		1 ls	Rp300.000.000,00		18-Jan-23	DINSOS P3A
8	pembangunan irigasi jaringan usaha tani	saluran air yang rusak		2	3	Sooko	Sooko		50 x 1	Rp200.000.000,00		18-Jan-23	dinas pertanian KPP
9	HIBAH - Sarana Prasarana Kemasyarakatan	petilasan desa yang terbengkalai		1	6	Sooko	Sooko		1 ls	Rp200.000.000,00		18-Jan-23	Dinas PMD
10	Hibah - Sarana Prasaran pemuda dan olah raga	butuh tempat olahraga yang layak khususnya volly		1	3	sombro	Sooko		1 ls	Rp200.000.000,00		18-Jan-23	DISBUDPARpORA
<b>D</b>	<b>DESA NGADIROJO</b>												
1	DRAINASE ( MBAYEM)	PENDANGKALAN SALURAN DRAINASE	PU			KRAJAN	NGADIROJO	75.5	2 KM	200.000.000			DPUPKP
2	JEMBATAN (TIMUR SMP)	TIDAK LAYAK	PU			KRAJAN	NGADIROJO	74.5	1100 M	1 MILYARD			DPUPKP
3	ASPAL (DEPAN SMP)	TIDAK LAYAK	PU			KRAJAN	NGADIROJO	74.5					DPUPKP
4	MASJID JAMI` DESA	TEMPAT PERIBADATAN DIDESA BELUM MEMADAI				KRAJAN	NGADIROJO		1 UNIT	400 000.000			SEKRETARIAT DAERAH
5	RABAT JALAN PLOSO S/D KUNIRAN DESA KLEPU	TIDAK LAYAK	POROS DESA			PLOSO	NGADIROJO	144.2	4KM	1 MILYARD			DPUPKP
6	PLENGSENGAN JALAN GUNTUR	MEMPERKUAT BADAN JALAN	POROS DESA	01	01	PLOSO	NGADIROJO		150	500.000.000			DPUPKP
7	ASPAL JALAN	MEMPERLANCAR TRANSPORTASI	PU			WATES	NGADIROJO	74.5	1KM	1 MILYARD			DPUPKP
8	DRAINASE BUYUT/PLOSO	PENDANGKALAN SALURAN DRAINASE	POROS DESA			PLOSO/BUYUT	NGADIROJO	144.0	300M	200.000.000			DPUPKP
9	ASPAL JALAN	ASPAL RUSAK	PU			CENTONG	NGADIROJO		4KM	4 MILYARD			DPUPKP
10	PASAR DESA	TIDAK LAYAK		02	05	KRAJAN	NGADIROJO		40MX50M	400.000.000			BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
11	IRIGASI JOKETRO	RUSAKNYA SALURAN				KARANGREJO	NGADIROJO		0,6M X 400M	200.000.000			DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN

													PERIKANAN
12	IRIGASI ROROMBO	RUSAKNYA SALURAN				WATES	NGADIROJO		0,60 X 800M	200.000.000			DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
13	IRIGASI PLOSO	RUSAKNYA SALURAN				PLOSO	NGADIROJO		0,60 X 800M	200.000.000			DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
<b>E</b>	<b>DESA KLEPU</b>												
1	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Dawuhan	1	1	Sambi	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Tengah Sawah	1	1	Sambi	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Bendo	1	2	Jogorejo	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	ngapak	2	1	Ngapak	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Sulingan	1	2	Klepu	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Sulingan	2	2	Klepu	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Bantol	2	2	Jogorejo	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Kuniran Bawah	2	4	Jogorejo	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN

													PERMUKIMAN
9	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Sentul	2	1	Jogorejo	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN TALUD	Badan Jalan Menyempit	Ngledok	1	2	Ngapak	KLEPU		150m	150.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	BKKDD - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA	Jalan Sudah Rusak	Krampung Watu Dakon	1	2	Jogorejo	KLEPU		200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
12	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Jalan Sudah Rusak	Mbantol	2	2	Jogorejo	KLEPU	1438	200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
13	BKKDD - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA	Jalan Sudah Rusak	Kuniran Atas	1	4	Jogorejo	KLEPU	1438	200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
14	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Jalan Sudah Rusak	Pondok	3	1	Klepu	KLEPU	1437	200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
15	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Jalan Sudah Rusak	Sambi	2	2	Sambi	KLEPU		200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
16	BKKDD - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA	Jalan Sudah Rusak	Sambi	2	1	Sambi	KLEPU	1437	200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17	BKKDD - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA	Jalan Sudah Rusak	Ngapak	2	1	Ngapak	KLEPU	1439	200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
18	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN	Jalan Sudah Rusak	Ngapak	2	1	Ngapak	KLEPU		200M	200.000.000	140/13/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN

	JALAN												KAWASAN PERMUKIMAN
19	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Genengan-Kilangan	2	1	Jogorejo	KLEPU	1439	500m	300.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Mbadut-Mbantol	2	2	Jogorejo	KLEPU	1438	1000m	800.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
21	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Kuniran Atas	1	4	Jogorejo	KLEPU	1438	1000m	800.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Ngelo	3	2	Sambi	KLEPU	1437	1500m	500.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Tanjung	1	1	Ngapak	KLEPU	1439	500m	400.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
24	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Ngapak	2	1	Ngapak	KLEPU	1439	300m	400.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
25	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Krampung	1	2	Jogorejo	KLEPU	1438	1000	500.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Mbadut-Mbantol	2	1	Sambi	KLEPU	1437	400	400.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
27	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JALAN	Aspal Jalan Sudah Rusak	Klepu Krajan	1	1	Klepu	KLEPU	1437	400	400.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
28	BELANJA PROGRAM -	plat deker jalan sudah rusak	Depan Kantor Desa	1	1	Jogorejo	KLEPU	1439	1	25.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM,

	PELEBARAN JEMBATAN												PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
29	BELANJA PROGRAM - PELEBARAN JEMBATAN	Jembatan rusak	Tempel	1	1	Jogorejo	KLEPU	1438	1	250.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023	26 Januari 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
30	BELANJA PROGRAM - PEMBANGUNAN JEMBATAN	Belum Ada Jembatan	Ngapak Kuniran	2	4	Jogorejo	KLEPU	1439	1	250.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31	BELANJA PROGRAM - PELEBARAN JEMBATAN	Jembatan Sempit	Ngapak - Jogorejo	2	1	Ngapak	KLEPU	1439	1	250.000.000	140/12/405.30.06.2002/2023		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>F</b>	<b>DESA SURU</b>												
1	REHAB BALAI/KANTOR DESA	Fasilitas pelayanan kantor Desa Suru kurang Volume 1 unit	Jalan Raya Suru Pulung	01	02	POPONGAN	SURU		1 Unit	300.000.000	140/12/405.30.06.2003/2023		TPK DESA
2	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (Sumur Dalam)	Irigasi pertanian di Desa Suru kurang mencukupi Volume 4 Unit	Desa Suru				SURU		4 Unit	1.400.000.000	140/20/405.30.06.2003/2023		TPK DESA
3	RABAT JALAN	Akses Perekonomian Desa Suru Terhambat Volume 1000 meter	Dukuh Bulu Rt. 01/01 Rt.02 Rw.05	01	01	BULU	SURU		1000 m	350.000.000			TPK DESA
4	RABAT JALAN	Akses Perekonomian masyarakat terhambat Volume 500 Meter	RT 01/05 - 02/08 DUKUH BULU			BULU	SURU		500M	250.000.000			TPK DESA
5	Pembangunan Drainase	badan jalan terkikis air volume 300 meter	RT 02/01 DUKUH GUNUNG TUKUL	02	01	GUNUNG TUKUL	SURU		300 M	200.000.000			TPK DESA
6	Pembangunan Drainase	badan jalan terkikis air volume 300 meter	RT 02/02 DUKUH GUNUNG TUKUL	02	02	GUNUNG TUKUL	SURU		300 M	200.000.000			TPK DESA
7	REHAB MASJID/MUSHOLA	sarana dan prasarana ibadah masyarakat kurang memadai volume 1 Unit	RT03/01 DUKUH GUNUNG TUKUL	03	01	GUNUNG TUKUL	SURU		1 Unit	100.000.000			TPK DESA
8	Pembangunan Talud	Saluran Irigrasi Di Desa Suru tidak lancar Vol 250 meter	RT 04/01 DUKUH GUNUNG TUKUL	04	01	GUNUNG TUKUL	SURU		250M	150.000.000			TPK DESA
9	Pembangunan Talud	Saluran Irigrasi di Desa Suru tidak lancar Vol 100 meter	RT 01/02 DUKUH GUNUNG TUKUL	01	02	GUNUNG TUKUL	SURU		100M	125.000.000			TPK DESA
10	Pembangunan Talud	Saluran Irigrasi di Desa Suru tidak lancar Vol 100meter	RT 01/02 DUKUH GUNUNG TUKUL	01	02	GUNUNG TUKUL	SURU		100M	125.000.000			TPK DESA
11	RABAT JALAN	Akses perekonomian masyarakat terhambat vol	RT 02/02 DUKUH GUNUNG TUKUL	02	02	GUNUNG TUKUL	SURU		130M	150.000.000			TPK DESA

		130meter											
12	Pembangunan Talud	saluran Irigrasi masyarakat terhambat (tidak lancar) vol 200meter	RT 02/02 DUKUH GUNUNG TUKUL	02	02	GUNUNG TUKUL	SURU		200M	150.000.000			TPK DESA
13	Pembangunan Talud	saluran irigasi masyarakat terhambat vol 200 meter	RT 02/03 DUKUH GUNUNG TUKUL	02	03	GUNUNG TUKUL	SURU		200M	150.000.000			TPK DESA
14	Pembangunan Talud	badan jalan terkikis air volume 200 meter	RT 02/03 DUKUH GUNUNG TUKUL	02	03	GUNUNG TUKUL	SURU		200M	150.000.000			TPK DESA
15	Pembangunan Talud	saluran irigrasi masyarakat Desa Suru tidak lancar vol 150 meter	RT 01/03 DUKUH GUNUNG TUKUL	01	03	GUNUNG TUKUL	SURU		200M	150.000.000			TPK DESA
16	Pembangunan Talud	badan jalan terkikis air volume 300 meter	RT 01/03 DUKUH GUNUNG TUKUL	01	03	GUNUNG TUKUL	SURU		150M	200.000.000			TPK DESA
17	Pembangunan Talud	badan jalan terkikis air volume 230meter	RT 01/03 DUKUH POPONGAN	01	03	POPONGAN	SURU		300M	175.000.000			TPK DESA
18	Pembangunan Talud	badan jalan terancam ambrol volume 180 meter	RT 02/03 DUKUH POPONGAN	02	03	POPONGAN	SURU		230M	2.000.000			TPK DESA
19	Pembangunan Drainase	saluran irigrasi di desa suru terhambat volume 200 meter	RT 01/04-02/04 DKH POPONGAN			POPONGAN	SURU		180M	2.000.000			TPK DESA
20	Pembangunan Drainase	saluran irigrasi terhambat volume 80 meter	RT 01/05 -01/06 DKH POPONGAN	01	05	POPONGAN	SURU		200M	100.000.000			TPK DESA
21	Pembangunan Drainase	saluran irigrasi terhambat volume 100 meter	RT 02/06 DKH POPONGAN	02	06	POPONGAN	SURU		200M	200.000.000			TPK DESA
22	Pembangunan Drainase	saluran irigasi terhambat volume 60 meter	RT 01/08 DKH POPONGAN	01	08	POPONGAN	SURU		80M	80.000.000			PU
23	Pembangunan Talud	badan jalan terancam ambrol volume 250 meter	RT01/08 DKH POPONGAN	01	08	POPONGAN	SURU		100M	200.000.000			PU
24	Pembangunan Talud	badan jalan terancam ambrol volume 300meter	RT 01/01 DKH SEPAT	01	01	SEPAT	SURU		60M	250.000.000			PU
	RABAT JALAN	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 400meter	RT 01/02 DKH SEPAT	01	02	SEPAT	SURU		250M	225.000.000			TPK DESA
25	Pembangunan Drainase	saluran irigasi terhambat volume 200 meter	PEDAK DKH SEPAT	01	03	SEPAT	SURU		300M	200.000.000			TPK DESA
26	Pembangunan Plengsengan	badan jalan terancam ambrol volume 200 meter	RT 02/04 DKH POPONGAN	02	04	POPONGAN	SURU		400M	200.000.000			PU
27	Pembangunan Plat Deker	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 1 Unit	Rt. 02 Rw. 04 Dukuh Popongan	02	04	POPONGAN	SURU		200M	75.000.000			TPK DESA
28	REHAB MASJID/MUSHOLA	sarana dan prasarana ibadah masyarakat kurang memadahi volume 4 Unit	Dukuh Gunung Tukul			GUNUNG TUKUL	SURU		200M	200.000.000			TPK DESA
29	PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN	Aliran air konsumsi Tidak Lancar volume 7000 meter	Gunung Tukul-Popongan			GUNUNG TUKUL	SURU		1 unit	75.000.000			TPK DESA
30	Pembangunan Drainase	saluran irigrasi terhambat volume 100 meter	RT 02/06 DKH POPONGAN	02	06	POPONGAN	SURU		200M	200.000.000			TPK DESA
31	Talud Drainase	Badan Jalan Terkikis Air Volume 400 meter	Dukuh Bulu Rt. 01-Rt2 Rw. 01	01,02	01	BULU	SURU		400 m	200.000.000			PU

32	Talud Drainase	Badan Jalan Terkikis Air Volume 600 meter	Dukuh Bulu Rt. 01-Rt2 Rw. 02	01,02	02	BULU	SURU		600 m	300.000.000			PU
33	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 1100meter	Pertigaan Bulu2-SDN 3 Suru			BULU	SURU		1100 m	500.000.000			TPK DESA
34	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 600meter	Dukuh Bulu Rw.5-Rw. 06	01,02	05,06	BULU	SURU		600 m	300.000.000			TPK DESA
35	rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 800meter	Dukuh Bulu Rw. 07 -Rw. 08	01,02	07, 08	BULU	SURU		800 m	400.000.000			TPK DESA
36	Talud Drainase	Badan Jalan Terkikis Air Volume 200 meter	Dukuh Bulu Rt. 01 Rw. 05	01	05	BULU	SURU		200 m	200.000.000			TPK DESA
37	Talud Drainase	Badan Jalan Terkikis Air Volume 200 meter	Dukuh Bulu Rw.5-Rw. 06	01,02	05,06	BULU	SURU		200 m	200.000.000			TPK DESA
38	Talud Drainase	Badan Jalan Terkikis Air Volume 200 meter	Dukuh Bulu Rw. 07 -Rw. 08	01,02	07,08	BULU	SURU		200 m	200.000.000			TPK DESA
39	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 100meter	Dukuh Bulu Rt. 02 Rw. 02	02	02	BULU	SURU		100 m	50.000.000			TPK DESA
40	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 100meter	Dukuh Bulu Rt. 01 Rw. 01	01	01	BULU	SURU		100 m	50.000.000			TPK DESA
41	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 300meter	Dukuh Bulu Rt. 02 Rw. 01	02	01	BULU	SURU		300 m	150.000.000			TPK DESA
442	Rehab Masjid	Masjid Baitul Jannah Sarana dan Prasarana Ibadah Belum Memadahi Volume 1 Unit	Dukuh Bulu Rt. 01 Rw. 02	01	02	BULU	SURU		1 Unit	100.000.000			TPK DESA
43	Rehab Masjid	Masjid Abdullah Bin Abbas Sarana dan Prasarana Ibadah Belum Memadahi Vol 1 unit	Dukuh Bulu Rt. 01 Rw. 03	01	03	BULU	SURU		1 Unit	50.000.000			TPK DESA
44	Rehab Masjid	Masjid Khoirul Huda Sarana dan Prasarana Ibadah Belum Memadahi Vol 1 Unit	Dukuh Bulu Rt. 01 Rw. 07	01	07	BULU	SURU		1 Unit	50.000.000			TPK DESA
45	Makadam Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 500meter	Dukuh Bulu (Sawah Ngampel)			BULU	SURU		500 m	150.000.000			TPK DESA
46	Makadam Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 500meter	Dukuh Bulu - Gedangan			BULU	SURU		500 m	150.000.000			TPK DESA
47	Irigasi Drainase	saluran irigrasi di desa suru Kurang memadai volume 400 meter	Dukuh Bulu Rt. 02- Rt. 01 Rw. 01	02		BULU	SURU		400 m	150.000.000			TPK DESA
48	Talud Drainase	Badan Jalan Terkikis Air Volume 1000 meter	Bulu2- Ngoren			BULU	SURU		1000m	300.000.000			TPK DESA
49	Plat Deker	Plat Deker Ruas Jalan Bulu-Ngoren Belum Layak	Ruas Jalan Bulu-Ngoren			BULU	SURU		2 Unit	50.000.000			TPK DESA

		Volume 2 Unit											
50	Peternakan Kambing Dombos/texel	Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis Peternakan Volume 1 Unit	Dukuh Bulu Rt. 02 Rw. 02	02	02	BULU	SURU		1 Unit	100.000.000			TPK DESA
51	Pembangunan Talud	Badan Jalan Terkikis Air Volume 150 meter	Dukuh Bulu Rt. 03 Rw. 03	03	03	BULU	SURU		150 M	150.000.000			TPK DESA
52	Pembangunan Talud	Badan Jalan Terkikis Air Volume 80 meter	Dukuh Popongan Rt. 02 Rw. 03	02	03	POPONGAN	SURU		80m	100.000.000			TPK DESA
53	Pembangunan Talud Drainase	saluran irigrasi di desa suru Kurang memadai volume 100 meter	Dukuh Popongan Rt. 02 Rw. 03	02	03	POPONGAN	SURU		100 m	90.000.000			TPK DESA
54	Pembangunan Talud Drainase	saluran irigrasi di desa suru Kurang memadai volume 100 meter	Dukuh Popongan Rt 01 Rw. 01	01	01	POPONGAN	SURU		100m	100.000.000			TPK DESA
55	Pelebaran Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 500meter	Dukuh Popongan Rt.. 01 Rw. 04- Rt. 02 Rw. 03			POPONGAN	SURU		500m	80.000.000			TPK DESA
56	Pembangunan Talud Drainase	saluran irigrasi di desa suru Kurang memadai volume 100 meter	Dukuh Popongan Rt 01 Rw. 06	01	06	POPONGAN	SURU		100 m	100.000.000			TPK DESA
57	Pembangunan Plat Deker	Plat Deker Ruas Jalan Popongan Belum Layak Volume 5 meter	Dukuh Popongan Rt 01 Rw.07	01	07	POPONGAN	SURU		5m	20.000.000			TPK DESA
58	Pembangunan Talud Drainase	saluran irigrasi di desa suru Kurang memadai volume 100 meter	Dukuh Popongan Rt 01 Rw.02	01	02	POPONGAN	SURU		100 m	100.000.000			TPK DESA
59	Peningkatan Jalan	akses perekonomian masyarakat Desa terhambat volume 200meter	Dukuh Popongan Rt 02 Rw.05	02	05	POPONGAN	SURU		200 m	100.000.000			TPK DESA
60	Pembangunan Talud Drainase	saluran irigrasi di desa suru Kurang memadai volume 300 meter	Dukuh Popongan Rt 02 Rw.04	02	04	POPONGAN	SURU		300 m	100.000.000			TPK DESA
61	Pembangunan Talud	Badan Jalan Terkikis Air Volume 300 meter	Dukuh Popongan Rt 02 Rw.06	02	06	POPONGAN	SURU		300 m	150.000.000			TPK DESA
62	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 100meter	Dukuh Popongan Rt 01 Rw.01	01	01	POPONGAN	SURU		100 m	50.000.000			TPK DESA
63	Plat Deker Jembatan	Plat Deker Belum Layak Volume 15meter	Dukuh Sepat Rt. 03 Rw. 02	02	03	SEPAT	SURU		15 m	150.000.000			TPK DESA
64	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 400meter	Dukuh Sepat Rt. 03 Rw. 02	03	02	SEPAT	SURU		400m	250.000.000			TPK DESA
65	Saluran Irigasi	saluran irigrasi di desa suru Kurang memadai volume 300 meter	Dukuh Sepat Rt. 01 Rw.02	01	02	SEPAT	SURU		300 m	200.000.000			TPK DESA
66	Rabat Jalan	Memperlancar Akses Masyarakat	Dukuh Sepat Rt. 02 Rw. 03	02	03	SEPAT	SURU		240 m	200.000.000			TPK DESA
67	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 600meter	Dukuh Sepat Rt. 01 Rw. 01	01	01	SEPAT	SURU		600 m	340.000.000			TPK DESA

68	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 200meter	Dukuh Sepat Rt. 04 Rw. 02	04	02	SEPAT	SURU		200 m	200.000.000			TPK DESA
69	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 200meter	Dukuh Sepat Rt. 02 Rw. 01	02	01	SEPAT	SURU		200 m	200.000.000			TPK DESA
70	Lampu Jalan	Penerangan Jalan Masyarakat Kurang memadai Volume 15 Titik	Dukuh Sepat Rt. 04 Rw. 02	04	02	SEPAT	SURU		15 Titik	75.000.000			TPK DESA
71	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 250meter	Dukuh Sepat Rt. 03 Rw. 02	03	02	SEPAT	SURU		250 m	200.000.000			TPK DESA
72	Rabat Jalan tepi jalan Poros	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 3000meter	Dukuh Gunung Tukul Rw 01,02,03	01,02,03		GUNUNG TUKUL	SURU		3000m	200.000.000			TPK DESA
73	Plengsengan	Pengaman badan Jalan Kurang memadai Volume 300meter	Dukuh Gunung Tukul Rt. 02/02-Rt. 01/03	02,01	02,03	GUNUNG TUKUL	SURU		300 m	350.000.000			TPK DESA
74	Rabat Jalan	akses perekonomian masyarakat terhambat volume 150meter	Dukuh Gunung Tukul Rt. 02 Rw. 03	02	03	GUNUNG TUKUL	SURU		150m	100.000.000			TPK DESA
75	Penahan Erosi	Pengaman Selokan kurang memadai Volume 200meter	Dukuh Gunung Tukul Rt. 04 Rw. 01	04	01	GUNUNG TUKUL	SURU		200m	150.000.000			TPK DESA
76	Talud	Saluran Irigrasi di Desa Suru tidak lancar Vol 400 meter	Dukuh Gunung Tukul Rt. 04 Rw. 01	04	01	GUNUNG TUKUL	SURU		400m	200.000.000			TPK DESA
77	Talud	Saluran Irigrasi di Desa Suru tidak lancar Vol 200 meter	Dukuh Gunung Tukul Rt. 01 Rw. 02	01	02	GUNUNG TUKUL	SURU		200 m	100.000.000			TPK DESA
78	Penerangan Jalan	Penerangan Jalan Umum Kurang Memadahi Volume 20 Unit	Popongan -Suru			Popongan-Suru	SURU		20 titik	100.000.000			PU

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sooko dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan rencana aksi dari Kecamatan Sooko dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah letak geografis Kecamatan Sooko yang wilayah bagian selatan merupakan daerah pertanian. Sedangkan wilayah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Pulung dan Timur Kecamatan Pudak dengan potensi utama sektor Pertanian dan Jasa.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada issue-isue dan analisa strategic. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sooko yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sooko Tahun 2021-2026

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Sooko mempunyai *tujuan* :

***“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”***

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan rencana aksi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program – program yang direncanakan Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :**

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;**

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ;**

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah**

- a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel TC-33**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN SOOKO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebuthan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kec. Sooko	<b>100%</b>	<b>1.885.129.762</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.905.129.762</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kec. Sooko	100%	3.000.000	APBD		100%	3.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Kec. Sooko	12 dokumen	2.000.000	APBD		12 dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kec. Sooko	10 dokumen	1.000.000	APBD		10 dokumen	1.000.000
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Kec. Sooko		1.466.275.548	APBD			1.474.776.548
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Sooko	17 orang	1.442.075.548	APBD		17 orang	1.448.075.548
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Kec. Sooko	150 dokumen	22.200.000	APBD		5 orang	22.700.000
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kec. Sooko	2 dokumen	2.000.000	APBD		5 dokumen	3.000.000

			<b>Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Kec. Sooko		15.800.000	APBD			16.500.000
			Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas	Kec. Sooko	17 orang	10.300.000	APBD		17 orang	10.500.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penerima Pendidikan dan pelatihan ASN	Kec. Sooko	1 Orang	5.500.000	APBD		1 Orang	6.000.000
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Kec. Sooko		<b>153.018.414</b>	APBD			<b>156.518.414</b>
			Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	Kec. Sooko	4 Paket	3.000.000	APBD		4 Paket	4.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kec. Sooko	4 Unit	27.692.800	APBD		4 Unit	27.692.600
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Sooko	1 Paket	2.370.511	APBD		1 Paket	2.870.511
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penerima Belanja Makan dan Minum	Kec. Sooko	17 Penerima	89.955.303	APBD		17 Penerima	90.955.303
			Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Sooko	1 Paket	5.000.000	APBD		1 Paket	5.000.000
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kec. Sooko	4 rakor	25.000.000	APBD		4 rakor	26.000.000

			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kec. Sooko	100%	13.000.000	APBD		100%	13.600.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Kec. Sooko	1.700 surat	3.000.000	APBD		1.700 surat	3.300.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	Kec. Sooko	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	10.500.000
			<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah</b>		Kec. Sooko		234.035.800	APBD			239.035.800
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Kec. Sooko	6 unit	70.000.000	APBD		6 unit	72.000.004
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan yang di pelihara	Kec. Sooko	4 unit	39.035.800	APBD		4 unit	40.035.800
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kec. Sooko	1 Paket	125.000.000	APBD		1 Paket	127.000.000
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan	Kec.Sooko		183.685.000	APBD			1.186.188.000
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	Kec. Sooko	100%	144.688.000	APBD		100%	145.688.000
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Seni Budaya dan Grebeg suro.HUT RI dan Pokja Sehat	Kec. Sooko	4 event	144.688.000	APBD		4 event	145.688.000

				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan publik yang disusun	Kec. Sooko	100 %	4.000.000	APBD		100 %	4.500.000
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat	Kec. Sooko	1 SPP	1.000.000	APBD		1 SPP	1.500.000
					Jumlah SOP yang diterbitkan	Kec. Sooko	38 SOP	1.500.000	APBD		38 SOP	1.500.000
					Jumlah Surat rekomendasi	Kec. Sooko	150 Surat	1.500.000	APBD		150 Surat	1.500.000
				<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kec. Sooko	100%	35.000.000	APBD		100%	36.000.000
				Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	Kec. Sooko	1 Penerima	35.000.000	APBD		1 Penerima	36.000.000
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Desa yang Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE )	Kec. Sooko		2.000.000	APBD			2.000.000
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM	Kec. Sooko	6 desa	1.000.000	APBD		6 desa	1.000.000
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa	Kec. Sooko	6 desa	1.000.000	APBD		6 desa	1.000.000
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Kec. Sooko	100%	20.750.000	APBD		100%	22.250.000
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Kec. Sooko	100%	8.750.000	APBD		100%	9.750.000
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kec. Sooko	2 even	8.750.000	APBD		2 even	9.750.000

			Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	Kec. Sooko	4 Rakor	12.000.000	APBD		4 Rakor	12.500.000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Kec. Sooko	100%	39.400.000	APBD		100%	41.900.000
			<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	Kec. Sooko	100%	39.400.000	APBD		100%	41.900.000
			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	Kec. Sooko	40 Produk	3.000.000	APBD		40	3.000.000
			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	Kec. Sooko	6 desa	2.400.000	APBD		6 desa	3.000.000
			Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum	Kec. Sooko	1 Kasus	7.000.000	APBD		1 Kasus	3.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang	Kec. Sooko	6 Desa	7.000.000	APBD		6.Desa	7.600.000
			Fasilitasi penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Kelompok PKK yang aktif	Kec. Sooko	6 desa	10.000.000	APBD		6 desa	12.000.000

## BAB IV

### USULAN PROGRAM / KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SOOKO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR		VOL UME	PERKIRAAN BIAYA		SUMBER DANA	KETERANGAN
			OUTPUT	OUTCOME		APBD KAB	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			<b>100 %</b>	<b>1.772.157.161.00</b>	<b>1.773.157.161.00</b>	DAU	
			Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian untuk Kelancaran tugas pokok dan fungsi						
			Prosentase dokumen perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu						
			Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi						
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	2.000.000	2.000.000	DAU	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	12 dokumen	1.000.000	1.000.000	DAU	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 dokumen	1.000.000	1.000.000	DAU	
		<b>Adminstrasi Keuangan</b>				<b>1.652.102.770,00</b>	<b>1.652.102.770,00</b>	DAU	

		<b>Perangkat Daerah</b>							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	17 orang	1.628.602.770.60	1.628.602.770.60	DAU	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	tersedianya jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	5 orang	22.500.000	22.500.000	DAU	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	tersusunnya dokumen laporan keuangan	5 dokumen	1.000.000	1.000.000	DAU	
		<b>Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				100.000	100.000	DAU	
		Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas	tersedianya pakaian dinas	17 orang	100.000	100.000	DAU	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penerima Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Pelatihan dan Pendidikan Bagi ASN	1 Orang	0	0	DAU	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>62.454.391</b>	<b>62.454.391</b>	DAU	
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	Tersediaanya Komponen listrik	4 Paket	2.500.000	2.500.000	DAU	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 Unit	0	0	DAU	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Tersedannya peralatan rumah tangga	1 Paket	0	0	DAU	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penerima Belanja Makan dan Minum	Tersediannya Makan minum ASN	17 Penerima	58.954.391,00	58.954.391.00	DAU	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tersediannya barang cetakan dan Pengandaan	1 Paket	1.000.000	1.000.000	DAU	
		Rapat rapat koordinasi dan	Jumlah rapat koordinasi dan	Terselenggaranya				DAU	

		konsultasi ke luar daerah	konsultasi luar daerah yang diikuti	rapat koordinasi dan konsultasi					
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13.000.000	13.500.000	DAU	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Terkelolanya surat keluar masuk	1.700 surat	3.000.000	3.000.000	DAU	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran telepon, air dan listrik	Tersedianya pembayaran telepon, air dan listrik	12 bulan	10.000.000	10.000.000	DAU	
		<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				42.500.000,00	42.500.000,00	DAU	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 unit	41.000.000	41.000.000	DAU	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	500.000,00	500.000.00	DAU	
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang di Pelihara	Tersedianya Gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	3 Paket	1.000.000	1.000.000	DAU	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Kecamatan	IKM Kecamatan		71.000.000,00	71.000.000,00	DAU	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Grebeg Tutup Syuro dan HUT RI, Pokja Sehat	Terselenggaranya event yang diadakan dalam rangka Grebeg Suro/ Seni budaya Dan Peringatan HUT RI. Pokja ZSehat	4 event	54.000.000,00	54.000.000,00	DAU	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak</b>	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan	Persentase dokumen	100 %	3.000.000	4.000.000	DAU	

		<b>dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	publik yang disusun	pelaksanaan pelayanan publik yang disusun					
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dibuat	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik (SPP)	1 SPP	1.000.000	1.000.000	DAU	
			Jumlah SOP yang di terbitkan	Tersusunnya SOP yang diterbitkan	38.SOP	1.000.000	1.000.000	DAU	
			Jumlah Surat Rekomendasi pindah datang yang diterbitkan	Tersedianya surat rekomendasi yang diterbitkan	150 Surat	1.000.000	1.000.000	DAU	
		<b>Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum</b>	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	14.000.000	14.000.000	DAU	
		Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah penerima jasa tenaga kebersihan	Tersedianya penerima jasa tenaga kebersihan	1 orang	14.000.000	14.000.000	DAU	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Indek Desa Membangun (IDM)	Indek Desa Membangun (IDM)		2.000.000	2.000.000	DAU	
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti BBGRM	Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kabupaten dan tersedianya desa yang mengikuti BBGRM	6 desa	2.000.000	2.000.000	DAU	
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dan jumlah desa yang mengikuti gotong royong tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan dan tersedianya desa yang melaksanakan BBGRM tingkat kecamatan	6 desa	2.000.000	2.000.000	DAU	
		<b>PROGRAM</b>	<b>Persentase Administrasi</b>	<b>Tersedianya</b>	100%	20.750.000	20.250.000	DAU	

		<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan</b>	<b>administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan</b>					
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	20.750.000	20.250.000	DAU	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Terselenggaranya kegiatan keagamaan	2 even	8.750.000	9.750.000	DAU	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	Terlaksanannya rakor Farum Koordinasi	4 Rakor	12.000.000	12.500.000	DAU	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Terciptanya desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan	100%	22.600.000	23.600.000	DAU	
		<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	Terciptanya koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	100%	22.600.000	23.600.000	DAU	
		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah produk hukum desa yang tersusun	Tersusunnya produk hukum desa	40 produk hukum desa	1.000.000	1.000.000	DAU	
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	Terlaksanannya fasilitasi pembinaan dan monitoring	6 desa	1.000.000	1.000.000	DAU	

				pelaksanaan ADD dan DD					
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan kecamatan	1 Kasus	3.600.000	3.600.000	DAU	
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	Terselenggaranya Musrenbang	6 desa	7.000.000	8.000.000	DAU	
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kelompok PKK aktif	Terselenggaranya kegiatan PKK	6 kelompok	10.000.000	10.000.000	DAU	
		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>1.889.007.161.40</b>	<b>2.130.967.762</b>		

## BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Sooko Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, kedisiplinan dan transparansi dari pelaku pembangunan sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Sooko Tahun 2024, Camat Sooko melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Sooko tahun 2024 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sooko setiap kegiatan. Rencana Kerja ini disusun dengan sedemikian rupa, sehingga hasilnya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( SAKIP ) Kecamatan Sooko.

Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahan. Untuk itu diperlukan kerja keras dari seluruh komponen aparatur agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam penyusunan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat** “

Sooko,   Maret 2023

